



**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 27 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN NUSA PENIDA  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2018-2023**

Semarang, Juli 2019

## DAFTAR ISI

JUDUL	
DAFTAR ISI.....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	8
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> ..	18
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	19
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ....	20
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	20
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	21
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	23
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	23
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	27
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	30
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	32
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	33

LAMPIRAN XXVII :  
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMER 29 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
KLUNGKUNG TAHUN 2018 - 2023

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NUSA PENIDA  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2018-2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah hal penting dalam administrasi pemerintahan dalam mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah fokus dalam mencapai tujuan pembangunan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Tujuan pembangunan daerah tersebut meliputi peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan pada tingkatan perangkat daerah disebut rencana strategis (renstra) perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karenanya, Kecamatan Nusa Penida sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung juga berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah sejalan dengan periode RPJMD Kabupaten Klungkung. Renstra Kecamatan Nusa Penida Tahun 2018-

2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan, dan strategi Bupati Klungkung yang dituangkan ke dalam program/kegiatan perencanaan pembangunan perangkat daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Nusa Penida Tahun 2018–2023 dilakukan melalui tahapan Persiapan, Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dilaksanakannya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Tahap persiapan meliputi pembentukan tim penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor Tahun 278/24/HK/2018, orientasi renstra kepada dan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra dan penyiapan data dan informasi perencanaan. Tahap penyusunan ranwal Renstra dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Ranwal RPJMD mencakup analisis terhadap gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Nusa Penida berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam ranwal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD serta perumusan rencana program, kegiatan, indikaotr kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Nusa Penida serta program dan pagu indikatif RPJMD. Tahap rancangan renstra adalah merupakan tahap penyempurnaan ranwal Renstra berdasarkan Surat Edaran Bupati Klungkung Nomor 050/172/Baperlitbang Tanggal 27 Maret 2019 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 untuk selanjutnya dibahas dalam Forum PD/Lintas PD, yang hasilnya dirumuskan dalam berita acara.

Tahap perumusan rancangan akhir Renstra adalah proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir

Renstra PD berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir ini bertujuan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda RPJMD. Terakhir dilaksanakan tahapan penetapan Renstra yang dimulai dari penyampaian Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Baperlitbang Kabupaten Klungkung untuk diverifikasi selambatnya 1 minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Setelah diverifikasi Baperlitbang menyampaikan Rancangan Akhir Renstra PD kepada Bupati Klungkung melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penetapan Renstra PD paling lambat 1 bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung disusun berdasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nusa Penida disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Nusa Penida dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Nusa Penida dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang memuat arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Nusa Penida ini, antara lain adalah:

- (1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun periode Renstra;
- (2) menjadi pedoman penyusunan rencana kerja Kecamatan Nusa Penida setiap tahunnya selama periode Renstra; dan
- (3) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua *Stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Nusa Penida.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### a. BABI PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan dokumen Renstra.

#### b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi PD, sumber daya yang dimiliki oleh PD, kinerja pelayanan sampai saat ini serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

#### c. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi PD, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah Provinsi Bali, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerjanya.

e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan mengenai strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.

f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan PD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja PD yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung.

h. BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh PD.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

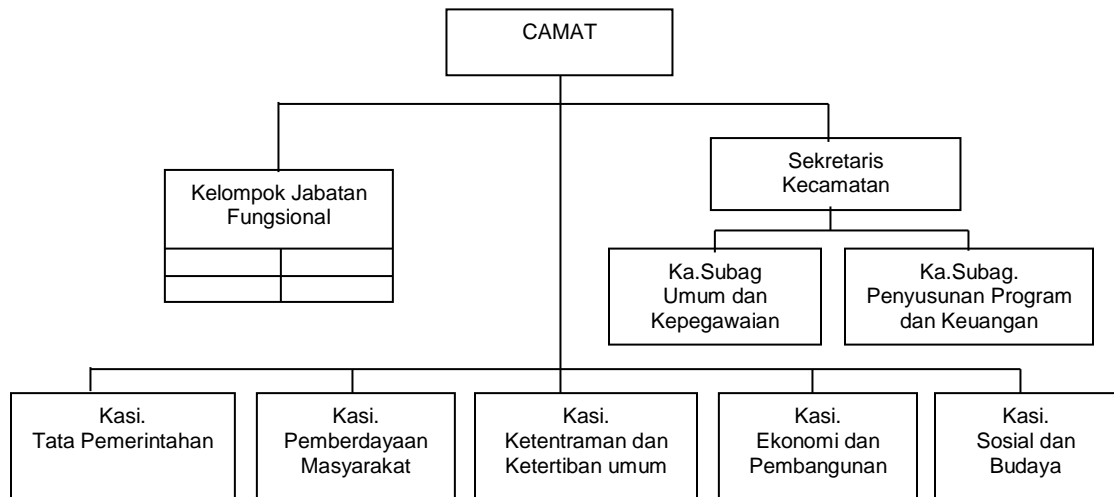
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari Camat dibantu oleh perangkat kecamatan yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Seksi Sosial dan Budaya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan. Adapun secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Nusa Penida



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Kualitas SDM sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tugas. Adapun gambaran SDM pada Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung per 1 Nopember 2018 adalah sebagaimana dalam tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

SDM Kecamatan Nusa Penida berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan Tahun 2018

No.	Usia	Jenis Kelamin			Golongan Ruang				Pendidikan				
		L	P	Jml	II	III	IV	Jml	SD	SMA	Diploma / S1	S2	Jml
1	20-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	31-40	3	3	6	2	3	-	-	-	-	4	1	5
3	41-50	5	2	7	-	7	-	-	-	-	7	-	7
4	51-60	9	-	9	3	6	1	-	-	3	6	-	9
Jumlah		17	5	22	5	16	1	-	-	3	17	1	22

SDM Kecamatan Nusa Penida berdasarkan tabel di atas untuk tingkat pendidikan didominasi oleh Diploma/S1, dan dilihat dari umur terlihat SDM didominasi tenaga produktif usia antara 31 tahun sampai dengan 50 tahun. Dari 21 SDM yang tersedia terdapat 14 Tenaga Kontrak. Sedangkan dilihat dari jabatan struktural, dari 9 jabatan struktural telah terpenuhi semuanya sebagaimana pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural dengan Pejabat Struktural pada SKPD Kecamatan Nusa Penida Tahun 2018

No.	Eselon	Jumlah	Yang Ada	Belum Terisi
1	Eselon III a	1	1	0
2	Eselon III b	1	1	0
3	Eselon IV a	5	5	0
4	Eselon IV b	2	2	0

Sedangkan distribusi SDM menurut unit kerja di Kecamatan Nusa Penida adalah sebagaimana dalam tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3  
Distribusi SDM Kecamatan Nusa Penida Tahun 2018

Gol/ Ruang	Sekretariat		Seksi Tapem		Seksi Sosbud		Seksi Ekbang		Seksi Trantib		Seksi PMD		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
III/d	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	6
III/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
III/b	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
III/a	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4
II/d	1	1	1		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
II/c															
II/b															
II/a															
Honorer / Kontrak	5	3	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	14
Jumlah	11	7	3	-	4	-	2	-	3	-2	-	1	-	-	33
Total	18		3		4		2		3		3				

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk kegiatan operasional Kecamatan Nusa Penida telah memiliki sarana dan prasarana yang baru terpenuhi kurang lebih 94% dari jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Adapun jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Nusa Penida dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3  
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Pada Kecamatan Nusa  
Penida

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Sepeda Motor	29 Unit	
2	Meja Kerja	28 Buah	
3	Kursi Kerja	11 Buah	
4	Meja Rapat	9 Buah	
5	Kursi Tamu di Ruang Pejabat	4 set	
6	Lemari dan Arsip Pejabat Lain lain	12 Buah	
7	Filling Besi	2 Unit	
8	Komputer/Peralatan Komputer	16 Unit	
9	Laptop	5 Unit	
10	Printer	8 Buah	
11	Mesin Potong Rumput	2 Unit	
12	AC	20 Unit	
13	Televisi	3 Unit	
14	Alat Rumah Tangga Lainnya	3 Unit	
15	Tanah Bangunan/Lapangan	3 Unit	
16	Meja Tamu Ruang Biasa	1 Buah	
17	Buffet Kayu	1 Buah	
18	Fax/Wireless	2 Unit	
19	Jam Mekanis	1 Buah	
20	Kursi Kayu/Rotan Bambu	1 set	
21	Kursi Lipat	88 Buah	
22	Papan Visual/Pengumuman	5 Buah	
23	White Board	8 Buah	
24	Bangunan Gedung dan Lainnya	14 Unit	
25	Lambang Garuda Pancasila	1 Buah	
26	Stalon Wagon	2 Unit	
27	Sofa	4 Buah	
28	Storage Modul Unit	1 Unit	
29	Jaringan Transmisi Tegangan di Bawah 100 KVA	2 Unit	
30	Brangkas	1 Buah	
31	Flashdisk	1 Buah	
32	Microphone	2 Buah	
33	Kamera Video	1 Buah	
34	Layar, Proyektor + Attachment	3 set	
35	Mesin Absen	1 Unit	
36	Alat Pembersih Lain lain	1 Unit	
37	Meja Resepsionis	1 Buah	
38	Handy Talky	16 Buah	
39	Lemari Penyimpanan	3 Buah	
40	Lemari Es	1 Buah	
41	Sound System	1 set	
42	Pahatan Batu-batuan	2 Unit	
43	Alat Komunikasi Lain lain	1 Unit	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Kecamatan Nusa Penida tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Kecamatan Nusa Penida

No	Urusan	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program									
					2014		2015		2016		2017		2018	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	95	95	95	96,88	95	99,79	95	100	-	-
2	Sda	Sda	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	87	87	90	90	92	92	94	94	-	-
3	Sda	Sda	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	-	-	40	40	-	-	80	80	-	-
4	Sda	Sda	Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Persentase Serapan Anggaran SKPD	-	-	-	-	-	-	75	90,85	-	-
5	Sda	Sda	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	90	100
6	Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	-	-	95	95	95	95	95	95	-	-

No	Urusan	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program									
					2014		2015		2016		2017		2018	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Sda	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	-	-	95	95	95	95	95	95	-	-
8	Sda	Sda	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	-	-	95	95	95	95	95	95	-	-
9	Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Sda	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	-	-	-	-	-	-	95	95	-	-
10	Sda	Sda	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	-	-	-	-	-	-	95	95	-	-
11	Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	Sda	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	-	-	95	95	95	95	95	95	-	-

No	Urusan	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program									
					2014		2015		2016		2017		2018	
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Sda	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	-	-	95	95	95	95	95	95	-	-
13	Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	Sda	Program Pembinaan dan Pemasarakataan Olah Raga	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	-	-	95	95	95	95	95	95	-	-
14	Sda	Sda	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	-	-	95	95	95	95	95	95	-	-
15	Bidang Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	Sda	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	-	-	95	95	95	95	95	-	-	-
16	Bidang Urusan Pilihan Pertanian	Sda	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	-	-	95	95	95	95	95	-	-	-
17	Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi	Sda	Program Peningkatan Pelayanan	Rata-rata Capaian Kinerja	95	95	95	95	95	95	95	95	-	-



No	Urusan	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program										
					2014		2015		2016		2017		2018		
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Penunjang Administratif Pemerintahan		Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan											
18	Sda	Sda	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Sda	Sda	Program Peningkatan / Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sda	Sda	Program Peningkatan / Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	95	95	95	95	95	95	-	-	-	-	-
21	Sda	Sda	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Sda	Sda	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	-	-	95	95	95	95	-	-	-	-	-

No	Urusan	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program										
					2014		2015		2016		2017		2018		
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
23	Sda	Sda	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95
24	Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	Sda	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	-	-	95	95	95	95	95	95	-	-	
25	Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administratif Pemerintahan	Meningkatkan Layanan Publik di Kecamatan	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	80	80	80	80	80	80	-	-	
26	Sda	Sda	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	
27	Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	-	-	50	50	60	60	75	75	-	-	
28	Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administratif Pemerintahan	Sda	Program Penataan Administrasi Kecamatan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	25	25	50	50	60	60	75	75	-	-	
29	Sda	Sda	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	

No	Urusan	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program										
					2014		2015		2016		2017		2018		
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Kelurahan												

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja dari tahun 2014 sampai dengan 2018 diatas 90% hal ini dikarenakan aparat seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Nusa Penida berusaha untuk merealisasikan seluruh kegiatan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat**

##### **Daerah**

Tantangan yang dihadapi dan kemungkinan akan dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri di era globalisasi, kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi.
- b. Dinamika peraturan perundangan yang menuntut adaptasi yang cepat.
- c. Kuantitas dan kualitas SDM pada SKPD Kecamatan Nusa Penida kurang memadai. Hal ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida.

Sedangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan Kecamatan Nusa Penida dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah cukup baik.
- b. Terbinanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara instansi se-Kecamatan Nusa Penida
- c. Komitmen dan kerja sama antar aparatur terbina dengan baik.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan gambaran capaian kinerja pelayanan pada periode Renstra sebelumnya dan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Nusa Penida dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan  
Permasalahan tersebut diakibatkan oleh akar masalah sebagai berikut :
  - a. Sarana dan prasarana aparatur kurang memadai;
  - b. Tingkat disiplin pegawai masih kurang;
  - c. Belum tertatanya arsip dengan baik;
  - d. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan OPD;
  - e. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja OPD;
  - f. Penyampaian laporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum akurat dan tepat waktu.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan  
Permasalahan tersebut diakibatkan oleh akar masalah sebagai berikut :
  - a. Belum optimalnya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah;
  - b. Masih minimnya bibit atlet olahraga di kecamatan;
  - c. Belum optimalnya sekolah melaksanakan UKS sesuai standar;
  - d. Masih adanya kasus wabah penyakit menular di Kecamatan;
  - e. Belum maksimalnya usulan rencana pembangunan kecamatan yang terakomodir;
  - f. Belum optimalnya penyusunan profil desa dan potensi kecamatan;

- g. Lapangan umum kecamatan belum memiliki sarana yang memadai;
  - h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - i. Belum optimalnya penyediaan informasi dan data kerawanan sosial;
  - j. Kecamatan Nusa Penida merupakan daerah rawan bencana.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin  
Permasalahan tersebut diakibatkan oleh akar masalah yaitu belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan di kecamatan.
4. Pemerintahan desa kurang tertib administrasi  
Permasalahan tersebut diakibatkan oleh akar masalah sebagai berikut :
- a. Kurangnya pemahaman perangkat desa akan peraturan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa yang selalu berubah;
  - b. Belum optimalnya penyusunan APBDesa;
  - c. Kesiapan desa mengikuti lomba belum optimal;
  - d. Belum optimalnya kegiatan posyandu.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Pembangunan Kabupaten Klungkung yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera.” Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi daerah yang disebut “Panca Santi” yaitu sebagai berikut :

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan;
4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik;

5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan sasaran yang hendak dicapai, maka Kecamatan Nusa Penida dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan misi 4 yaitu terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif. Sedangkan tujuan urusan yang hendak dicapai Kecamatan Nusa Penida ialah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan sasaran yaitu; terpenuhinya pelayanan kesekretariatan, meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, meningkatnya layanan publik di Kecamatan, dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin yang diakibatkan oleh karena belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan di kecamatan.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

SKPD Kecamatan Nusa Penida berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Klungkung yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana tata ruang wilayah ini ditelaah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033.

Disini dinyatakan bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Klungkung dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan yang berdasarkan Tri Hita Karana, perlu dilaksanakan penataan ruang wilayah. Adapun pelaksanaan penataan ruang wilayah tersebut mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengarahkan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Klungkung yang memberikan manfaat bagi semua kepentingan, secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha.

#### 3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap dokumen KLHS dilakukan sebagai upaya untuk memastikan tujuan dan sasaran strategis daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan menjadi acuan dalam menyelenggarakan kinerja layanan perangkat daerah. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung adalah tujuan 16 yaitu “menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dengan target “mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

### **3.5. Penentuan Isu-isu strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, serta telaahan terhadap dokumen RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Kecamatan Nusa Penida adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesekretariatan sangat menunjang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target hasil yang ditetapkan.

b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan

Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan menjadi salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin  
Meningkatnya layanan publik di Kecamatan sangat didukung peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin, untuk itu diperlukan upaya meningkatkan sosialisasi dan perubahan pendekatan pelayanan perijinan di Kecamatan.
- d. Pemerintahan Desa kurang tertib administrasi  
Pemerintahan Desa yang tertib administrasi adalah hal yang penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa, untuk itu diperlukan upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang peraturan dan administrasi pemerintahan desa bagi Perangkat Desa di Kecamatan.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### 4.1.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Nusa Penida

Berpedoman pada tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, dan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai maka Kecamatan Nusa Penida dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama mendukung pelaksanaan misi 4 (empat) yaitu terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik. Misi 4 (empat) memiliki tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja yaitu indeks kualitas pelayanan publik.

Tabel 4.1

Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang terkait  
Tugas dan Fungsi Kecamatan Nusa Penida

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran	Tujuan Jangka Menengah SKPD
Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Berdasarkan tujuan jangka menengah perangkat daerah tersebut ditetapkan indikator dan target kinerja tujuan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Nusa Penida Tahun 2019-2023

Tujuan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,34 poin	3,35 poin	3,37 poin	3,38 poin	3,39 poin	3,40 poin	3,40 poin

Berdasarkan tabel diatas maka tujuan jangka menengah Kecamatan Nusa Penida adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur dari tingkat indeks kualitas pelayanan publik dengan target capaian pada tahun 2023 (akhir periode renstra) adalah sebesar 3,40 poin

#### 4.1.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Nusa Penida

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Kecamatan Nusa Penida menetapkan sasaran jangka menengah untuk menjawab isu-isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Nusa Penida Tahun 2019-2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	15 poin	15,5 poin	16 poin	16,5 poin	17 poin	17 poin
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	95 persen	96 persen	98 persen	99 persen	100 persen	100 persen

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Layanan Publik Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	75 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

#### 4.2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nusa Penida

Berdasarkan sasaran jangka menengah Kecamatan Nusa Penida Tahun 2019-2023, maka ditetapkan IKU Kecamatan Nusa Penida adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nusa Penida  
Tahun 2019-2023

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Penjelasan
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,35 poin	3,37 poin	3,38 poin	3,39 poin	3,40 poin	Perhitungan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
		Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	15 poin	15,5 poin	16 poin	16,5 poin	17 poin	Diukur melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang di assessment oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	96 persen	98 persen	99 persen	100 persen	Jumlah capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dibagi

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Penjelasan
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									jumlah kegiatan koordinasi dikali 100%
		Meningkatnya Layanan Publik Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Indeks kepuasan masyarakat melalui kuisisioner
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah desa tertib administrasi di Kecamatan Banjarangkan berbanding jumlah desa keseluruhan di Kecamatan Banjarangkan

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi Kecamatan Nusa Penida

Strategi dan arah kebijakan dalam renstra merupakan strategi dan kebijakan yang menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD dan target kinerja hasil (*outcomes*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi yang dirancang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran dan Strategi Kecamatan Nusa Penida Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Memenuhi kebutuhan pelayanan kesekretariatan
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan
		Meningkatnya Layanan Publik Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan sosialisasi dan perubahan pendekatan pelayanan perijinan di kecamatan
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang peraturan dan administrasi pemerintahan desa

## 5.2. Arah Kebijakan Kecamatan Nusa Penida

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Untuk mendukung pelaksanaan strategi sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.1 di atas, maka dirumuskan arah kebijakan selama lima tahun pelaksanaan Renstra ini sebagai berikut :

Tabel 5.2

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Nusa Penida Tahun 2019-2023

No	Strategi	Arah Kebijakan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Memenuhi kebutuhan pelayanan kesekretariatan	Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	√	√	√	√	√
		Peningkatan disiplin pegawai	√	√	√	√	√
		Penataan dan pengelolaan kearsipan sesuai klasifikasi	√	√	√	√	√
		Penyediaan dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	√	√	√	√	√
		Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkualitas	√	√	√	√	√
		Penyampaian laporan dan pertanggungjawaban keuangan yang akurat dan tepat waktu	√	√	√	√	√
2	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Mengoptimalkan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	√	√	√	√	√
		Meningkatkan pembinaan bibit atlet olah raga di Kecamatan	√	√	√	√	√
		Meningkatkan pembinaan UKS di sekolah sesuai standar	√	√	√	√	√
		Meningkatkan koordinasi lintas sektoral bidang kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular di Kecamatan	√	√	√	√	√
		Penyediaan dokumen rencana pembangunan tingkat Kecamatan yang berkualitas melalui pelaksanaan Murenbang Kecamatan	√	√	√	√	√
		Penyediaan buku rekapitulasi profil Desa dan buku potensi Kecamatan yang berkualitas melalui pembinaan kepada perangkat Desa	√	√	√	√	√

No	Strategi	Arah Kebijakan	2019	2020	2021	2022	2023
		Penyediaan sarana dan prasarana olah raga di lapangan umum Kecamatan yang memadai	√	√	√	√	√
		Meningkatkan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat	√	√	√	√	√
		Penyediaan data kerawanan sosial di Kecamatan yang berkualitas	√	√	√	√	√
		Meningkatkan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam di Kecamatan	√	√	√	√	√
3	Meningkatkan sosialisasi dan perubahan pendekatan pelayanan perijinan di kecamatan	Meningkatkan pelaksanaan pelayanan PATEN di Kecamatan sesuai SOP	√	√	√	√	√
4	Meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang peraturan dan administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan pemahaman dan kemampuan perangkat desa melalui pembinaan akan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan Desa yang tertib administrasi	√	√	√	√	√
		Penyediaan SK evaluasi APBDesa yang tepat waktu melalui pembinaan dan evaluasi penyusunan APBDesa kepada perangkat Desa	√	√	√	√	√
		Meningkatkan koordinasi dan pembinaan lomba Desa	√	√	√	√	√
		Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kegiatan Posyandu	√	√	√	√	√

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dibuat berdasarkan sasaran hasil (*outcome*) yang harus disediakan dalam rangka mewujudkan target sasaran perangkat daerah. Secara jelas hubungan tujuan, sasaran dan strategi dengan program yang dirancang dalam Renstra dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Tabel 6.1

Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Kecamatan Nusa Penida  
Tahun 2019-2023

Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Sasaran Program ( <i>outcome</i> )	Program/Indikator Kinerja <i>Outcome</i> Program
Meningkatnya kualitas pelayanan publik IK : <i>Indeks kualitas pelayanan publik (Poin)</i>	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan IK : <i>Indeks reformasi birokrasi Perangkat Daerah (Poin)</i>	Memenuhi kebutuhan pelayanan kesekretariatan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesekretariatan	Program Pelayanan Kesekretariatan IK : <i>Indeks reformasi birokrasi Perangkat Daerah (Poin)</i>
	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan IK : <i>Rata-rata capaian knerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan (%)</i>	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan IK : <i>Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan (%)</i>
	Meningkatnya layanan publik di Kecamatan IK : <i>Indeks kepuasan masyarakat (%)</i>	Meningkatkan sosialisasi dan perubahan pendekatan pelayanan perijinan di kecamatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan IK : <i>Indeks kepuasan masyarakat (%)</i>



Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Sasaran Program (outcome)	Program/Indikator Kinerja Outcome Program
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan IK : <i>Persentase Desa yang tertib administrasi (%)</i>	Meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang peraturan dan administrasi pemerintahan desa	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan perangkat Desa tentang administrasi pemerintahan desa	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan IK : <i>Persentase Desa yang tertib administrasi (%)</i>

## 6.2. Program, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja serta Pagu Indikatif Tahun 2019-2023

Program, kegiatan, indikator dan target kinerja Kecamatan Nusa Penida tahun 2019-2023 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.2  
Cascading Program Kegiatan dan Kinerja Kecamatan Nusa Penida  
Tahun 2019-2023

Sasaran Program (outcome)	Program/Indikator Kinerja Outcome Program	Sasaran Kegiatan (output)	Kegiatan/Indikator Kinerja Output Kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesekretariatan	Program Pelayanan Kesekretariatan IK : <i>Indeks reformasi birokrasi Perangkat Daerah (Poin)</i>	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur IK : <i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>
		Meningkatnya disiplin aparatur	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD IK : <i>Capaian disiplin aparatur (%)</i>
		Tertatanya arsip sesuai klasifikasi	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan IK : <i>Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%)</i>
		Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD IK : <i>Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu (Dokumen)</i>
		Tersedianya laporan kinerja	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

Sasaran Program (outcome)	Program/Indikator Kinerja Outcome Program	Sasaran Kegiatan (output)	Kegiatan/Indikator Kinerja Output Kegiatan
		tepat waktu	IK : <i>Laporan kinerja terkirim tepat waktu (Dokumen)</i>
		Tersedianya laporan keuangan tepat waktu	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD IK: <i>Laporan keuangan terkirim tepat waktu (Dokumen)</i>
Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan IK : <i>Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan (%)</i>	Terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah yang optimal	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah IK : <i>Jumlah hari-hari besar yang diperingati (Kali)</i>
		Terpenuhinya bibit atlet olah raga dan seni di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan IK : <i>Persentase cabang olah raga dan seni yang dipertandingkan (%)</i>
		Terlaksananya UKS di sekolah sesuai standar	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah Sesuai Standar IK : <i>Persentase sekolah melaksanakan UKS sesuai standar (%)</i>
		Terselenggaranya koordinasi pemerintahan umum di bidang sosial budaya kecamatan yang optimal	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan IK : <i>Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi (%)</i>
		Tersedianya dokumen rencana pembangunan tingkat Kecamatan yang berkualitas	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan IK : <i>Dokumen rencana pembangunan tingkat Kecamatan (Dokumen)</i>
		Tersedianya buku rekapitulasi profil Desa dan buku potensi Kecamatan yang berkualitas	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan IK : <i>Buku rekapitulasi profil Desa dan buku potensi Kecamatan (Buku)</i>
		Terselenggaranya	Kegiatan Penyelenggaraan

Sasaran Program ( <i>outcome</i> )	Program/Indikator Kinerja <i>Outcome</i> Program	Sasaran Kegiatan ( <i>output</i> )	Kegiatan/Indikator Kinerja <i>Output</i> Kegiatan
		koordinasi pemerintahan umum di bidang ekonomi dan pembangunan yang optimal	Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Ekonomi dan Pembangunan IK : <i>Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi (%)</i>
		Tersedianya data kerawanan sosial di Kecamatan yang berkualitas	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial IK : <i>Data kerawanan sosial di Kecamatan (Data)</i>
		Terselenggaranya koordinasi pemerintahan umum di bidang ketentraman dan ketertiban yang optimal	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban IK : <i>Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi (%)</i>
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan IK : <i>Indeks kepuasan masyarakat (%)</i>	Terlaksananya pelayanan perijinan dan non perijinan di kecamatan yang optimal	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan IK : <i>Persentase layanan sesuai SOP (%)</i>
Meningkatnya pemahaman dan kemampuan perangkat Desa tentang administrasi pemerintahan desa	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan IK : <i>Persentase Desa yang tertib administrasi (%)</i>	Terpenuhinya Desa yang tertib administrasi	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa IK : <i>Jumlah Desa tertib administrasi (Desa)</i>
		Tersedianya SK evaluasi APBDes tepat waktu	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDes IK : Persentase SK evaluasi APBDes tepat waktu (%)
		Terpenuhinya kepesertaan lomba Desa yang optimal	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu IK : <i>Persentase jenis lomba yang diikuti (%)</i>
		Terselenggaranya koordinasi pemerintahan umum di bidang pemberdayaan masyarakat yang	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan masyarakat IK : <i>Cakupan kegiatan koordinasi yang</i>

---

Sasaran Program <i>(outcome)</i>	Program/Indikator Kinerja <i>Outcome</i> Program	Sasaran Kegiatan <i>(output)</i>	Kegiatan/Indikator Kinerja <i>Output</i> Kegiatan
		optimal	<i>difasilitasi (%)</i>

Secara lengkap program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif program kegiatan Kecamatan Nusa Penida Tahun 2019-2023 sebagaimana pada tabel 6.3 terlampir.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam 5 (lima) tahun kedepan periode Renstra ini Kecamatan Nusa Penida melaksanakan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan ini adalah indikator dan target kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja bidang pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	15 poin	15,5 poin	16 poin	16,5 poin	17 poin	17 poin
2	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang Dikoordinasikan	95 persen	95 persen	96 persen	98 persen	99 persen	100 persen	100 persen
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
4	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	75 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Kecamatan Nusa Penida sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka Kecamatan Nusa Penida berkewajiban menyusun Renstra Kecamatan Nusa penida dengan berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023.

Renstra Kecamatan Nusa Penida memuat gambaran umum kinerja selama lima tahun sebelumnya, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan arah kebijakan serta program kegiatan, indikator dan target kinerja dan pagu indikatif pendanaan selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Renstra ini merupakan pedoman bagi Kecamatan Nusa Penida dalam menyusun Renja Kecamatan Nusa Penida setiap tahunnya serta menjadi instrumen bagi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Rencana tindak lanjut Renstra ini dijabarkan dalam Renja Kecamatan Nusa Penida yang akan menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD untuk ditetapkan menjadi DPA SKPD. Pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam DPA SKPD dijabarkan dalam rencana aksi program kegiatan.
- Penambahan program dalam Renja setelah dilaksanakan perubahan RPJMD dan Renstra Kecamatan Nusa Penida kecuali diamanatkan oleh peraturan yang berlaku, sedangkan untuk penambahan kegiatan pada renja dapat dilakukan setelah dilaksanakan perubahan renstra.
- setiap perubahan RPJMD diikuti dengan perubahan Renstra.
- Ketersediaan pagu anggaran pelaksanaan program dan kegiatan akan mempengaruhi pemasangan target kinerja yang telah direncanakan dalam Renstra ini.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA